

BAB SATU PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Manusia dan politik¹ merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Politik adalah sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh mahluk yang bernama manusia.² Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani Kuno mengatakan manusia adalah *zoon politicon* - binatang yang berpolitik.³ Politik merupakan kewajiban semua manusia yang mendambakan kebebasan dan kemerdekaan hidup bersama dalam masyarakat.⁴ John Locke menambahkan bahwa terbentuknya dunia politik atau negara didahului oleh keberadaan individu yang memiliki hak-hak kodrati. Keadaan ini disebut keadaan alamiah atau keadaan kebebasan, tetapi bukan keadaan di mana orang berbuat sekehendaknya.⁵

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya politik itu berangkat dari kepentingan manusia atau warga negara. Tujuan daripada politik adalah bagaimana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai belajar untuk mewujudkan

1. Politik (dari bahasa Yunani: **πολιτικός** *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah [proses](#) pembentukan dan pembagian [kekuasaan](#) dalam [masyarakat](#) yang antara lain berwujud proses [pembuatan keputusan](#) khususnya dalam negara. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik> [diakses tanggal 24 Desember 2014])

2. Imran Hasibuan, *Politik Itu Suci: Pemikiran Dan Praktik Politik Sabam Sirait* (Jakarta: Q Communication, 2013), 3.

3. Untuk meraih tujuan hidupnya, hewan mengandalkan cara-cara di luar kualitas manusia. Hewan bertindak atas naluri semata-mata, sementara manusia dibimbing oleh rasio dan nuraninya. Di sisi lain, sudah merupakan kebutuhan obyektif bahwa manusia tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya dan harus membutuhkan manusia lain. Untuk mencapai tujuan bersama itulah manusia menyelenggarakan aturan main yang dinamakan politik. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara manusia dan jenis mahluk lain yang tidak memiliki kapasitas berpolitik. Inilah alasan mengapa Aristoteles memakai kata *zoon politikon*. (Hasibuan, *Politik Itu Suci: Pemikiran Dan Praktik Politik Sabam Sirait*, 3.)

4. Robert P. Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi & PSE STT Jakarta, 2006), 2-3.

5. John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 8.

sistem negara demokrasi.⁶ Para ahli politik sering menegaskan bahwa penerapan prinsip demokrasi sekurang-kurangnya memiliki tiga alasan:

1. Agar setiap orang dapat melihat dirinya berguna bagi orang lain.
2. Agar setiap orang sedapat mungkin terlindungi dari kemalangan yang seharusnya ia tidak terima.
3. Agar setiap orang memiliki kesempatan untuk berinisiatif dengan segala macam cara positif yang tidak merugikan orang lain.⁷

Pada hakikatnya, komponen utama demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, peluang untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara semakin terbuka lebar bagi setiap warga negara. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat untuk mau berpartisipasi demi tercapainya kemaslahatan publik atau *res publica*. Oleh sebab itu, tepatlah Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸ Pemerintah sendiri adalah bagian dari rakyat yang dipercayakan secara khusus untuk mengatur jalannya roda pemerintahan dalam suatu negara.

Setiap orang di bumi pasti dilahirkan terlebih dahulu sebagai warga dari suatu bangsa. Setelah itu, lewat pertobatan dan iman kepada Yesus, barulah ia “dilahirkan kembali” sebagai warga kerajaan surga.⁹ Melalui pernyataan ini, maka semua orang Kristen atau warga Gereja sebagai umat beragama yang terikat dalam satu identitas kependudukan atau kebangsaan, juga harus memperhatikan pergumulan bangsa atau perpolitikan di mana mereka berada. Terlebih lagi bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab juga berbicara mengenai masalah politik. Bahkan, bagi para pengikut Calvin, mereka menjadikan Alkitab sebagai acuan dalam melakukan aktivitas politik. Hal ini dijelaskan oleh Henry Meeter sebagai berikut:

⁶. Demokrasi adalah [bentuk pemerintahan](#) yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan [hukum](#). Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik [kebebasan politik](#) secara bebas dan setara. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> [diakses tanggal 10 Agustus 2015]).

⁷. Mikhael Dua, Febiana R. Kainama, Kasdin Sihotang, ed., *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama* (Jakarta: Penerbit OBOR, 2008), 263.

⁸. Amanat yang disampaikan pada Dedication of the Cemetery di Gettysburg, 19 November 1863. (Lihat John W. De Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia Yang Adil*, terj. Martin Lukito Sinaga [Jakarta: Gunung Mulia, 2003], 6.)

⁹. Samuel Tumanggor, *Demi Allah dan Demi Indonesia: Suatu Pergulatan tentang Ihwal Kenasranian dan Kebangsaan* (Bandung: Satu-Satu, 2006), 13.

Ketika berdiskusi mengenai relasi Alkitab kepada politik. Alkitab adalah kaidah iman dan praktik Calvinis dalam segala hal; oleh karena itu, dalam bidang politik kaidahnya juga sama. Hal ini sangat mudah untuk dipahami. Menurut para Calvinis, Allah adalah berdaulat dimana saja. Oleh karena itu, Firman-Nya adalah juga hukum untuk dunia politis. Sejak Alkitab merupakan Firman Allah, kaidah iman sekaligus pimpinan-Nya, para Calvinis berunding dengannya sebagai bimbingan dalam aktivitas politiknya.¹⁰

Bagi seorang Calvinis, hal tersebut adalah mutlak karena menurut John Calvin, Alkitab adalah buku yang memberi norma dan prinsip untuk segala hal di dalam dunia. Meeter, mengutip Calvin, mengatakan, “ *This book of Scripture, besides being the corrective of the book of nature, also contains eternal principles which are to guide the conduct of human society. Therefore, the Bible becomes the book at last appeal and in a special sense the basis for the Calvinist’s view on politics.*”¹¹

Negara Indonesia sudah merdeka lebih dari 69 tahun, namun masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduknya. Hal ini dikarenakan adanya oknum pemerintah yang tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurut John Locke, kekuasaan politik dengan mana pemerintah melaksanakan fungsinya harus dipergunakan hanya untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan pribadi.¹² Namun, realitas pemerintahan saat ini justru terjadi sebaliknya. Ada banyak pejabat dan politikus yang bermasalah dan tersandung kasus hukum karena menggunakan politik justru sebagai “alat” untuk memperkaya diri dan kelompoknya, serta memuaskan hasrat berkuasa. Akibatnya, apapun bisa dan akan dilakukan demi untuk berpengaruh secara politis. Hal ini dipertegas oleh Imran Hasibuan dalam bukunya *Politik Itu Suci* demikian:

Politik itu kotor, penuh aksi manipulatif dan retorika kosong. Citra seperti itulah yang mewarnai atmosfer perpolitikan di negeri ini. Tak perlu berbagai survei untuk mengonfirmasi hal tersebut. Simaklah pembicaraan rakyat di warung kopi sampai kafe, arisan ibu-ibu rumah tangga sampai aksi jalanan para mahasiswa, demonstrasi buruh hingga seminar ilmiah para akademisi: bisa dipastikan, bila berkaitan dengan urusan politik, yang terdengar adalah sinisme – yang sering kali bernada sarkasme. Hari-hari ini hampir tak terdengar orang membicarakan politik dengan kalimat positif.¹³

¹⁰. H. Henry Meeter, *The Basic Ideas of Calvinism: 6th edition* (Grand Rapids: Baker Book, 1990), 74.

¹¹. Meeter, *The Basic Ideas of Calvinism: 6th edition*, 74.

¹². Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat*, 8.

¹³. Hasibuan, *Politik Itu Suci: Pemikiran Dan Praktik Politik Sabam Sirait*, 1.

Pada akhirnya, politik dipandang sebagai suatu ranah yang gelap, menyesatkan, dan duniawi. Dampaknya adalah banyak golongan masyarakat yang menghindari politik, dan salah satunya adalah warga gereja. Padahal, Tuhan memanggil Gereja dari dalam dunia, dan mengutusnyanya ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran dan kehendak Allah (tanda-tanda kerajaan Allah) di dalam semua lapangan kehidupan, termasuk bidang politik.¹⁴ Karena itu, apa yang dilakukan oleh Gereja – suka atau tidak suka – berpengaruh langsung atau tidak langsung pada bangsa dan negara secara keseluruhan. Sebaliknya pun demikian, apa yang dilakukan oleh negara juga membawa dampak bagi Gereja.¹⁵ Gereja sebagai lembaga dan negara tidak dapat hidup dalam isolasi absolut satu sama lain. Kendatipun bersifat superior terhadap negara karena tujuan ultimanya bersifat supranatural, dan karenanya melampaui tujuan temporal negara, Gereja tetap berada di dalam negara.¹⁶ Gereja sebagai lembaga dipimpin oleh rohaniwan. Fakta mengenai Gereja yang anti terhadap politik, pada saat yang sama juga mencerminkan masih minimnya peran rohaniwan dalam menyikapi realitas politik dan dampaknya yang terjadi di masyarakat.

Rohaniwan Kristen adalah orang yang diyakini sebagai “alat” Tuhan di dunia, yang memiliki peranan dalam menyadarkan dan menggerakkan umat untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan saling mengasihi. Hal ini berarti juga turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah sosial, yang mana salah satunya adalah masalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Suasana demokratis yang berlaku di Indonesia saat ini harus ditanggapi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan panggilan-Nya. Dengan kata lain, rohaniwan juga harus berfungsi sebagai garam dan terang dalam bidang politik, sebagaimana nabi-nabi Allah di dalam Perjanjian Lama menyuarakan kehendak Allah kepada pemerintahan manusia yang sedang memberontak terhadap Allah dan menyengsarakan umat Allah. Penulis sependapat dengan pernyataan Sabam Sirait, seorang politikus Kristen yang mengatakan, “Bahwa politik bisa menjadi kotor, itu betul. Tapi, kalau dalam politik sudah bersih semua, *ngapain* harus kita layani dan bersaksi di situ? Justru karena banyak tantangan dalam politik, kita harus melayani dan bersaksi.”¹⁷

¹⁴. Zakaria J. Ngelow, “Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik,” dalam *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, ed. Zakaria J. Ngelow et al. (Makassar: Oase Intim, 2013), 291-304.

¹⁵. Dua, kainama, Sihotang, ed., *Politik Katolik, Politik Kebajikan Bersama*, 6.

¹⁶. Jacques Maritain, *Man and the State* (Washington: The Catholic University of America Press, 1998), 152-154.

¹⁷. Hasibuan, *Politik Itu Suci*, 3.

Di antara kalangan rohaniwan Kristen sendiri, muncul pandangan yang pro dan kontra mengenai peranan rohaniwan Kristen dalam bidang politik. Wayne Grudem dalam bukunya *Politics According to the Bible* menyatakan tentang golongan yang pro sebagai berikut:

Pandangan ini mengatakan bahwa Gereja seharusnya berusaha mengubah hukum-hukum dan budaya dan tidak seharusnya (selalu) menekankan penginjilan. Saya tidak mengetahui banyaknya tanggung jawab pemimpin Injili atau kelompok Kristen terkemuka hari ini yang memegang pandangan ini dan mengatakan orang Kristen seharusnya “*do politics, not evangelism*.”¹⁸

Kemudian mengenai golongan yang kontra, Wayne Grudem menjelaskan sebagai berikut:

Pandangan salah lainnya mengenai orang Kristen dan politik adalah dipromosikan oleh kaum Injili yang pada dasarnya mengatakan, “kita seharusnya hanya mengkhhotbahkan Injil, dan bahwa hanya itu caranya orang Kristen dapat berharap untuk mengubah hati manusia dan mengubah masyarakat kita. Saya menyebutnya sebagai pandangan “*do evangelism, not politics*.” Pandangan ini mengklaim bahwa Gereja hanya dipanggil untuk memberitakan Injil dan bukan memberitakan tentang politik.¹⁹

Melalui pandangan pro dan kontra tersebut, isu utamanya adalah bahwa kekristenan akan selalu berhubungan dengan politik, Gereja akan selalu berhubungan dengan negara. Oleh sebab itu, peranan rohaniwan Kristen dalam bidang politik adalah hal yang mutlak, namun yang menjadi masalah adalah peranan seperti apa yang harus diberikan dan yang seturut dengan firman Tuhan.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal pula bahwa sudah ada rohaniwan Kristen yang berperan dalam bidang politik. Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) periode 2014-2019 di Indonesia yang diselenggarakan pada Juli 2014 lalu, dapat menjadi studi kasus untuk mengamati bagaimana rohaniwan Kristen di Indonesia berperan dan sekaligus menjalankan haknya sebagai warga negara dalam bidang politik. Pilpres tersebut menyandingkan dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan nomor urut satu adalah Prabowo Subianto sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapres, kemudian pasangan nomor urut dua adalah Joko Widodo sebagai capres dan Jusuf Kalla sebagai cawapres. Sejak masa kampanye, pencoblosan, hingga

¹⁸. Wayne Grudem, *Politics According to the Bible: A Comprehensive Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture* (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 44.

¹⁹. Grudem, *Politics According to the Bible*, 53.

penentuan pemenang melalui KPU dan MK, ada beragam respons rohaniwan terhadap agenda politik lima tahunan ini. Menurut penulis, ada beberapa rohaniwan Kristen yang keliru dalam memberikan peranan. Disebutkan keliru karena peranan para rohaniwan Kristen tersebut justru melibatkan mereka dalam politik praktis. Beberapa diantaranya adalah Pdt. Dr. Nus Reimas,²⁰ Pdt. Dr. Jacob Nahuway,²¹ dan beberapa rohaniwan Kristen lain yang juga pernah dikeluhkan oleh anggota jemaatnya.²²

Tanggung jawab politik. Tanggung jawab politik didefinisikan sebagai bentuk kesadaran dan tindakan untuk berperan serta aktif maupun pasif, langsung atau tidak langsung terhadap peristiwa-peristiwa politik di tanah air. Hal ini berbeda dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan secara aktif dan pasif, langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik. Tanggung jawab politik lebih menunjuk pada sebuah kesadaran dan kewajiban serta peranan yang bersifat lebih umum, sementara partisipasi politik lebih menunjuk pada keterlibatan yang bersifat lebih khusus atau praktis.

Pokok Permasalahan

Dari pemaparan latar belakang penulisan topik peranan rohaniwan Kristen dalam bidang politik di Indonesia, maka pokok permasalahan topik ini antara lain:

1. Peranan yang masih minim dari rohaniwan Kristen untuk berkontribusi dalam bidang politik khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab masalah ini adalah sebuah stigma bahwa orang Kristen sebagai kaum minoritas di Indonesia sehingga tidak akan mampu dan sulit untuk berperan. Stigma yang demikian kemungkinan besar akibat kurangnya pengetahuan akan sejarah dan informasi, secara khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimana

²⁰. <http://politik.news.viva.co.id/news/read/513548-300-pendeta-dukung-prabowo-subianto-hatta-rajasa> (diakses tanggal 24 Desember 2014).

²¹. <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/10/ketua-umum-Gereja-pentakosta-capres-harus-berlantar-tni> (diakses tanggal 23 Desember 2014).

²². <http://politik.kompasiana.com/2014/06/23/surat-untuk-bapak-pdt-gilbert-lumindong-bapak-pdt-nus-reimas-dan-bapak-pdt-jacob-nahuway-tentang-dukungan-untuk-prabowo-660219.html> (diakses tanggal 24 Desember 2014).

ada begitu banyak kontribusi orang-orang Kristen di dalamnya. Fenomena “buta sejarah” ini juga sedang dialami oleh banyak warga negara Indonesia secara umum, akibatnya semangat patriotisme semakin lama semakin redup.

2. Keraguan dan kebingungan untuk berperan. Masalah ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar dalam hal konsep dan prinsip teologis iman Kristen khususnya menyangkut hal-hal politik secara umum.
3. Peranan yang keliru bahkan tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan dari seorang rohaniwan Kristen sehingga mengakibatkan munculnya keresahan di dalam jemaat. Pada akhirnya, rohaniwan Kristen tersebut bukan menjadi “sumber berkat” melainkan menjadi “batu sandungan” khususnya dalam bidang politik.

Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran untuk berperan, serta memberikan gambaran konteks perpolitikan di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi ketika hendak berkontribusi. Tujuan pertama ini dilakukan dengan melakukan penelusuran sejarah beberapa tokoh nasional Kristen untuk menemukan kesaksian dan kontribusi mereka dalam mengusahakan kemaslahatan publik di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi pengingat dan penyadaran bagaimana orang Kristen (khususnya rohaniwan Kristen) memahami posisi

dan perannya dalam rangka berkontribusi bagi negara pada masa kini dan yang akan datang.

2. Memberikan pemikiran, konsep, dan prinsip teologis dalam bidang politik menurut pandangan teologi Injili. Dengan demikian diharapkan rohaniwan Kristen dapat memiliki pemahaman dan pedoman yang tepat ketika akan memberikan peranannya. Hal ini penting dalam rangka menjadi garam dan terang dalam bidang politik yang gelap, menyesatkan, dan duniawi.
3. Mengusulkan beberapa bentuk peranan rohaniwan Kristen yang diharapkan dapat menjadi sesuatu yang terus dikembangkan serta tetap sesuai dengan dasar dan prinsip teologis iman Kristen.

Pembatasan Penulisan

Beberapa pembatasan penulisan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan istilah politik, ketika menyebutkan istilah politik, yang dimaksudkan penulis adalah politik secara umum dan bukan politik Kristen.
2. Pembatasan denominasi, rohaniwan yang dimaksudkan penulis dalam skripsi ini adalah rohaniwan Kristen Protestan dan lebih khusus kepada kaum Injili.
3. Pembatasan sejarah, penulis akan menjelaskan secara ringkas dan padat sejarah umum perpolitikan di Indonesia sejak masa pergerakan nasional

hingga masa reformasi, namun akan lebih berfokus kepada bagaimana kontribusi kekristenan khususnya melalui tokoh-tokoh Kristen dalam sejarah tersebut.

Metodologi Penulisan

Skripsi ini digolongkan ke dalam ranah Teologi Praktika dengan menggunakan penelitian kualitatif.²³ Penulis menggunakan metodologi deskriptif-analitis dimana penulis mempelajari literatur-literatur, baik akademis maupun praktis, yang berkaitan dengan sejarah, konsep, dan filosofi yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Di dalam bab satu, penulis menyajikan latar belakang permasalahan mengenai peranan yang minim dan keliru dari rohaniwan Kristen dalam bidang politik di Indonesia. Bab satu ini juga terdiri dari pokok permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan melakukan tinjauan terhadap tokoh Kristen yang pernah atau tengah berperan dalam perpolitikan di Indonesia. Bab ini akan memperlihatkan bagaimana orang Kristen dapat turut berperan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan tetap mengekspresikan iman Kristen-nya.

Bab III, pada bab ini akan dilakukan pembahasan khusus mengenai pemikiran dan pandangan iman Kristen dari dua orang teolog yang juga memberikan kontribusi yang besar dalam bidang politik di dunia. Pertama adalah Abraham Kuyper melalui doktrin Kristologi Kosmik yang menghasilkan teori wilayah kedaulatan (sphere

²³. Teologi Praktika didefinisikan sebagai refleksi teologis-kritis atas praktik Gereja ketika berinteraksi dengan praktik-praktik dunia, dengan sebuah pandangan untuk memastikan dan memampukan partisipasi yang setia di dalam praktik-praktik Allah yang sifatnya menebus dalam, untuk dan bagi dunia. (John Swinton dan Harriet Mowat, *Practical Theology and Qualitative Research* [London: SCM, 2006], 6.).

sovereignty). Dan kedua adalah Stanley Hauerwas dengan etika naratif Kristus yang menghasilkan teori orang Kristen sebagai penduduk asing (Resident Aliens).

Bab IV, bab ini akan memberikan implikasi praktis dan saran tentang peranan politis seperti apa yang bisa dilakukan oleh rohaniwan Kristen berdasarkan seluruh pemaparan yang dijelaskan.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan refleksi terhadap seluruh kajian yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini.